



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA
DAERAH DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

BERLIAN NUR AWANIZ

7250406513

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si Akt
NIP. 197905022006042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

PERPUSTAKAAN
UNNES

Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Semarang, Februari 2011

Penguji

Drs. Kusmuriyanto, M.Si
NIP. 196005241984031001

Anggota I

Anggota II

Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si Akt
NIP. 197905022006042001

PERPUSTAKAAN
UNNES
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Februari 2011

Berlian Nur Awaniz
7250406513

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al Baqoroh 286).
- Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan (Gen. Collin Powell).
- Dari sistem pendidikan yang terbukti berhasil di seluruh dunia, citra diri ternyata lebih penting dari materi pelajaran (Gordan Dryden)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Mama dan Papa tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang, keikhlasan, pengorbanan dan dukungan.
- Almamater Universitas Negeri Semarang
- Ade-ade ku dan seluruh keluarga tersayang yang selalu memberikan motivasi serta keluarga besar Warisman Yusuf.
- Dian siswoyo yang selalu memberikan dukungan.
- Sahabat BFF, orang terdekat, teman seperjuangan "Akuntansi S1 2006" yang selalu memberikan dukungan.
- Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing kami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Eks Karesidenan Pekalongan” tepat pada waktunya. Segenap usaha dan kerja penulis tidak mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang yang ditunjukkan dan digariskan-Nya.

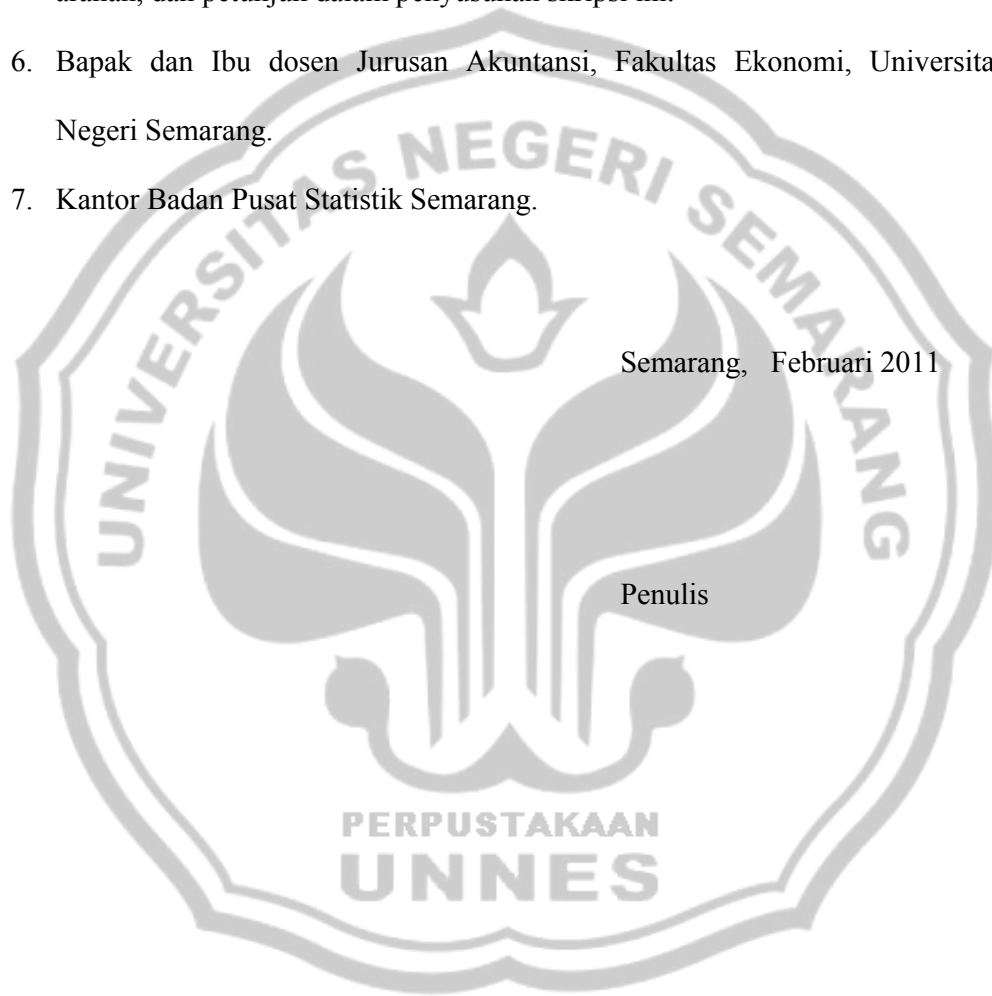
Penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menyusun skripsi.
2. Drs. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk menyusun skripsi.
3. Drs. Fachrurrozie M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unnes yang telah memberikan izin penelitian skripsi.

4. Drs. Fachrurrozie M.Si, dan Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si Akt dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Kusmuriyanto, M.Si dosen penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
7. Kantor Badan Pusat Statistik Semarang.

Semarang, Februari 2011

Penulis



SARI

Awaniz, Berlian Nur. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan”. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Fachrurrozie M.Si. II. Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si Akt.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial variabel berpengaruh terhadap belanja daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah se Eks Karesidenan Pekalongan. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah se Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2008. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda.

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi $Y = -140.862.197.333,89 + 1,090X_1 + 5,356X_2$ secara simultan menunjukkan F hitung = 92,314 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga H_1 yang menyatakan ada pengaruh positif antara dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diterima. Variabel (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} 11,964 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga H_2 yang menyatakan ada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diterima. Variabel pendapatan asli daerah (X_2) diperoleh t_{hitung} 8,174 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_A diterima, sehingga H_3 yang menyatakan ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diterima.

Simpulan dalam penelitian ini secara simultan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Saran dalam penelitian ini pemerintah diharapkan dapat memeberikan akuntabilitas terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga diharapkan denganadanya akuntabilitas dan transparasi dari penggunaan dana tersebut maka dana akan digunakan sebagaimana mestinya. Dan pendapatan asli daerah pemerintah diharapkan bisa mengalokasikan dana sebagaimana mestinya sehingga nantinya tidak terjadi devisit pada anggaran yang telah direncanakan.

ABSTRACT

Awaniz, Berlian Nur. 2011. "The Effect of General Allocation Fund (DAU) and Revenue (PAD Againts) Ex-Local Expenditures in Pekalongan Residency." thesis Department of Accounting, Faculty of Economics. State University of Semarang. Supervising I. Drs. Fachrurrozie M.Si. II Bestari Dwi Handayani, S.E, M.Si Akt.

Keywords: General Allocation Fund, Regional Revenue and Expenditures.

General allocation Fund is a kind of intergovernmental transfers that are not tied to specific spending programs. General allocation fund is intended to replace the transfers of subsidies autonomous regions and Presidential Instruction. Revenue is the revenue obtained by the originating sector, local, taxes, levies, local property management outcomes that are separated and other income are legitimate. The purpose of this study was to determine the effect of partial variables simultaneously and the effect the shopping area.

The population in this study is a local government financial reports Pekalongan Residency Ex. Samples are reports of income and expenditure of local government areas as the year Ex Pekalongan Residency 2004-2008. Methods of data collection in this research a method of documentation. The data analysis technique used is multiple linear regression. The result of simultaneous information.

The result obtained by the regression equation $Y = -140.862.197.333,89 + 1.090X_1 + 5.356 X_2$ simultaneously shows $F_{count} = 92.314$ with significant value $0.000 < 0.05$ hence H_0 is rejected and the H_A is received, so the H_1 which states there is a positive influence on the general allocation fund and local revenues to expenditures is received. Variable (X_1) obtained t value 11.964 with significant value $0.000 < 0.05$ hence H_0 is rejected and the H_A is received, so the H_2 which states have the effect of block grants local shopping receipt. Variable-source revenue (X_2) obtained t count with significant value $0.000 < 0.05$ hence H_0 is rejected and the H_A is received, so that the H_3 which states there in the influence of local revenues to expenditures is received.

Conclusion in this study simultaneously the general allocation fund and variable revenue positive effect on local spending. Hypotesis test result also showed as significant effect. Suggestion in this study are expected to give government accountability for the use of these funds, so hopefully with the accountability and transparency of the use of these funds, the funds will be used as appropriate. Government revenue is expected to allocate the funds properly so that they would not happen devisit on the planned budget.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	8
2.1.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	9
2.2 Belanja Daerah (BD)	10
2.2.1 Belanja Tak Langsung	11
2.2.1.1 Belanja Pegawai	12
2.2.1.2 Belanja Bunga	12
2.2.1.3 Belanja Subsidi	12
2.2.1.4 Belanja Hibah	12

2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	13
2.2.1.6 Belanja Bagi hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah.....	13
2.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa.....	14
2.2.1.8 Belanja Tidak Terduga.....	14
2.2.2 Belanja Langsung	15
2.2.2.1 Belanja Pegawai.....	15
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa.....	15
2.2.2.3 Belanja Modal	16
2.2.3 Pembiayaan Daerah	16
2.3 Dana Perimbangan.....	18
2.3.1 Bagi Hasil Pajak	18
2.3.2 Bagi Hasil bukan Pajak	19
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU).....	19
2.5 Dana Alokasi Khusus	23
2.5.1. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27
2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
2.6.1 Pajak Daerah.....	29
2.6.2 Retribusi Daerah.....	29
2.6.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30
2.6.4 Lain-lain Pendapatan yang sah.....	31
2.7 Kerangka Berpikir	31
2.8 Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Populasi dan Sampel.....	36
3.3 Jenis Data	36
3.4 Variabel penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Analisis Data	39

3.6.1 Analisis Deskriptif	39
3.6.2 Analisis Inferensial	40
3.6.2.1 Uji Normalitas Data	40
3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.3 Analisis Regresi.....	44
3.6.3.1 uji Pengaruh Simultan (F test).....	44
3.6.3.2 Uji Pengaruh Parsial (t test)	45
3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi Simultan (R^2)	45
3.6.3.4 Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2)	46
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Variabel	47
4.1.1 Dana Alokasi Umum	47
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah	50
4.1.3 Belanja Daerah	53
4.2 Analisis Inferensial	53
4.2.1 Uji Normalitas	53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	56
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas	56
4.2.2.2 Uji Autokorelasi	57
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.3 Uji Regresi Berganda	58
4.2.4 Uji Hipotesis	60
4.2.4.1 Uji F (Uji Hipotesis Simultan)	60
4.2.4.2 Uji t (Uji Hipotesis Parsial)	61
4.2.5 Koefisien Determinasi	63
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) terhadap Belanja Daerah (Y).....	64
4.3.2 Pengaruh Pengapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y).....	65
4.3.3 pengaruh dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli	

daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y).....	66
BAB V PENUTUP	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

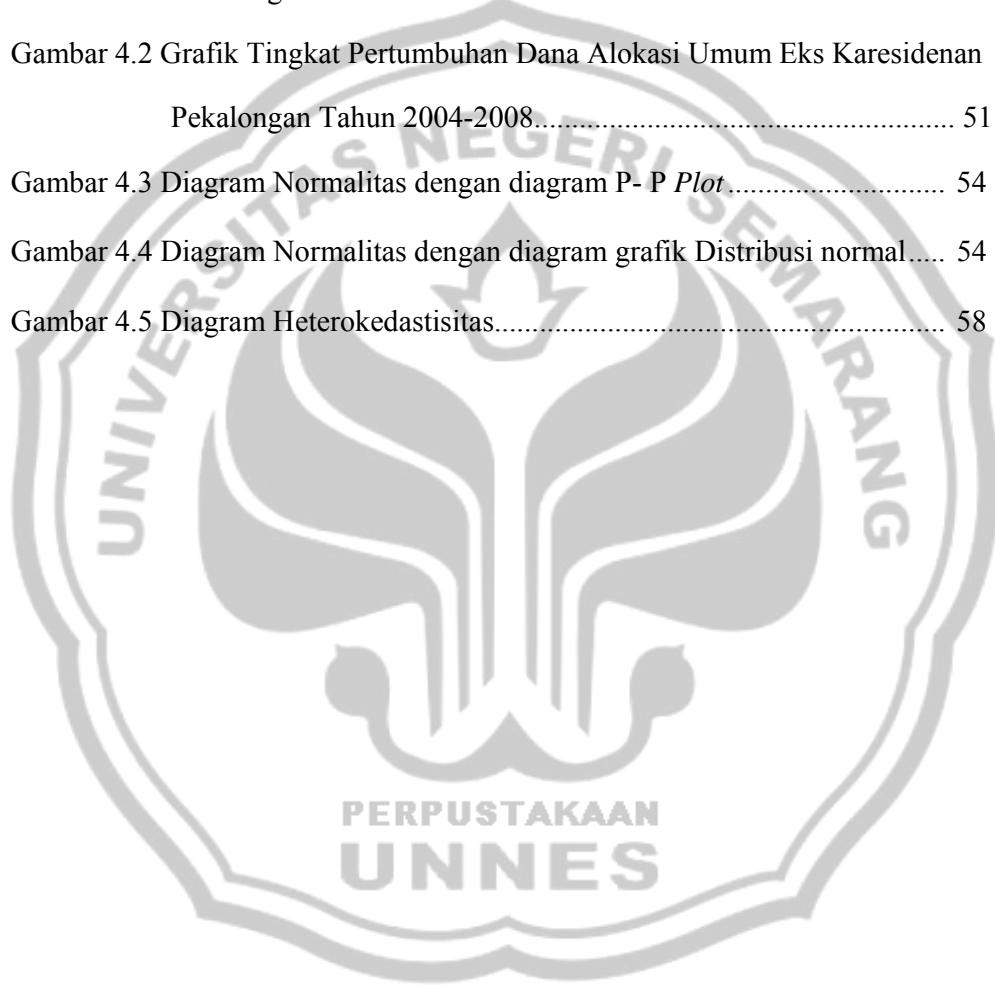


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Durbin Waston</i>	43
Tabel 4.1 Gambaran Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008	47
Tabel 4.2 Pergerakan Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008.....	48
Tabel 4.3 Deskripsi Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008	49
Tabel 4.4 Gambaran Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008.....	50
Tabel 4.5 Pergerakan Pendapatan Asli Daerah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008.....	51
Tabel 4.6 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008	52
Tabel 4.7 Deskripsi Belanja Daerah Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008	53
Tabel 4.8 Uji Normalitas menggunakan <i>Kolmogrov smirnov Z</i>	55
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Multikolinearitas	56
Tabel 4.10 Hasil pengujian <i>Durbin Watson</i>	57
Tabel 4.11 Uji Pengaruh Dana alokasi Umum (X1) dan Pendapatan asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y).....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji t pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.....	62
Tabel 4.14 Hasil Uji t pengaruh Pendapatan asli Daerah terhadap Belanja Daerah	62
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

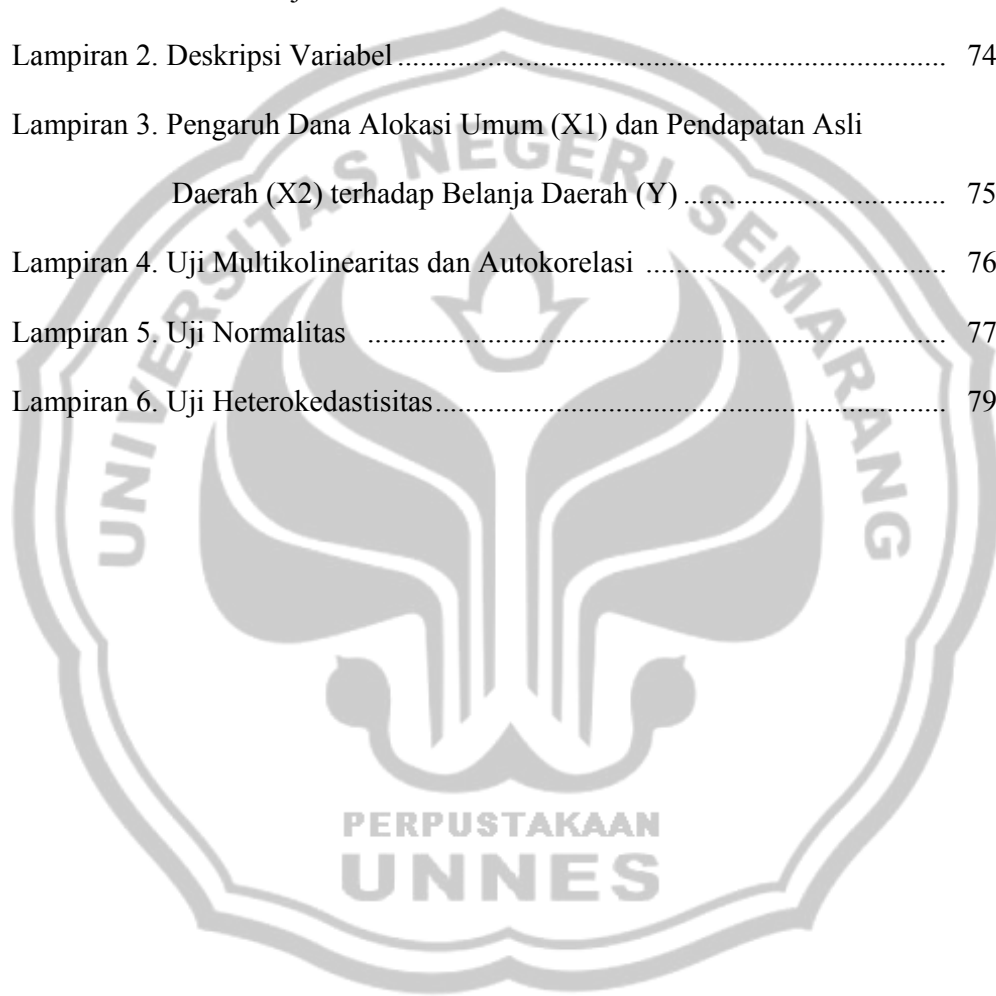
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berfikir	35
Gambar 4.1 Grafik Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008.....	48
Gambar 4.2 Grafik Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2004-2008.....	51
Gambar 4.3 Diagram Normalitas dengan diagram P- P <i>Plot</i>	54
Gambar 4.4 Diagram Normalitas dengan diagram grafik Distribusi normal.....	54
Gambar 4.5 Diagram Heterokedastisitas.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
Lampiran 1. Tabulasi Data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2004-2008	72
Lampiran 2. Deskripsi Variabel	74
Lampiran 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y)	75
Lampiran 4. Uji Multikolinearitas dan Autokorelasi	76
Lampiran 5. Uji Normalitas	77
Lampiran 6. Uji Heterokedastisitas.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten). Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004

tentang pemerintah daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya

(Bambang Haryadi, 2002) Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonomi yakni pemerintah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara susunan pemerintahan.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan

tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.

(Simanjuntak, 2006) Penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia yaitu di bidang keuangan daerah, relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan penerimaan/kontribusi yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD, sedangkan PAD yang meningkat setiap tahun

mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung pada dana pusat.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD, namun pada praktiknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan APBD. Harapan Pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan.

Masalah yang sering terjadi pada belanja dan anggaran belanja daerah pada umumnya adalah belanja aparatur yang ada dalam belanja publik, hingga mencapai lebih dari 50% dari total anggaran belanja publik yang memberikan beberapa dampak yaitu pemborosan dibagian aparatur, dimana hal ini menjadi ruang rentan terhadap tindak korupsi. Alokasi dana yang seharusnya dimaksimalkan untuk pelayanan dasar masyarakat dipakai cukup banyak untuk membiayai belanja aparatur, yang akibatnya mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik/ masyarakat. Anggaran yang sedikit diperebutkan oleh banyak

sektor, banyak kepentingan dan banyak masyarakat. Bagi yang tidak mempunyai akses, konsekuensinya tidak akan mendapat anggaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu menurut Kesit (2004) dalam Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah studi kasus di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Hasil penelitiannya diperoleh secara empirik menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah. Dari penelitian tersebut didapat bahwa koefisien regresi DAU sebesar 0,778 dan koefisien regresi PAD sebesar 1,964 dan juga didapatkan bahwa variabel DAU dan PAD dapat menjelaskan sebesar 71,3% berpengaruh terhadap pengaruh belanja daerah. Data yang digunakan oleh peneliti adalah poling data dimana data yang diambil yaitu data tahun 2004-2008, dari hasil tersebut dapat dilihat variabel DAU dan PAD memberikan pengaruh terhadap belanja daerah.

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Aaberge & Langorgen (1997), Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi & Milas (2001), Zampelli (1986) dan Sukriy & Halim (2004). (Maemunah, 2006). (Bambang Kesit, 2004) Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi Belanja Daerah studi empirik di wilayah Jateng dan DIY.

Hasil penelitiannya diperoleh secara empirik membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat , dan juga menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah

Peneliti akan menguji kembali pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Eks Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui variabel DAU dan variabel PAD memberikan pengaruh terhadap Belanja Daerah dan juga ingin mengetahui kemampuan DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul:

“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Di Eks Karesidenan Pekalongan”

1.1 Rumusan Permasalahan

Setelah melihat dari latar belakang yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan ?
2. Adakah pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan ?

3. Adakah pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin menganalisis pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan terhadap Belanja Daerah Eks Karesidenan Pekalongan.
2. Ingin menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Eks Karesidenan Pekalongan.
3. Ingin menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Eks Karesidenan Pekalongan.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama mengenai Belanja Daerah. Dan dapat mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu berupa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan.

Daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat tersebut. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau Rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang bersangkutan. Untuk itu APBD harus disusun dengan memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, efektifitas (*value for money*).

Sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan di UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2.1.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menuai keberhasilan atau kegagalan

penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan memngupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2.2 Belanja Daerah (BD)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002:68) sedangkan Bastian (2002:53) menyatakan bahwa belanja daerah adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan oleh berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode

anggaran tertentu.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari :

2.2.1 Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka.

2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2.2.1.2 Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah

Belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah daerah adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada propinsi, kabupaten/ kota kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah propinsi
- b. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota
- c. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- d. Belanja daerah bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten / kota
- e. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pengeluaran uang dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.

2.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/ kota kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengeloaalannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri dari :

- a. Bantuan keuangan kepada pemerintah propinsi
- b. Bantuan keuangan kepada pemerintahan kabupaten/kota
- c. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- d. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

2.2.1.8 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengeluaran yang disediakan untuk :

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan .
- c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

2.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

2.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus dihari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.2.2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, dll

Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Belanja pembangunan ini pada akhirnya akan menghasilkan kapital publik dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh

pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, Propinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- a. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- c. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2.3.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutana, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. (Sri Nawatmi, 2006) Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan.

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah. Proporsi dana alokasi umum antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangn kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus formula DAU :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana :

AD : Gaji PNS daerah

CF : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi pembayaran gaji PNS masing-masing daerah perbulan, yang besarnya telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. gaji rata-rata 15%
2. Kenaikan tunjangan jabatan fungsional tertentu rata-rata 10%
3. Kenaikan tunjangan jabatan struktural untuk eselon III, IV dan V
4. Pemberian tunjangan fungsional umum bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan

5. Pemberian gaji bulan ke-13
6. Gaji untuk CPNS Formasi tahun 2005 yang telah ditetapkan oleh Menpan

Komponen variabel kebutuhan fiskal yang digunakan untuk pendekatan penghitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah. Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan kontruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Formula kebutuhan fiskal :

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB)$$

Dimana :

TBR : Total Belanja Rata-rata APBD
 IP : Indeks Jumlah Penduduk
 IW : Indeks Luas Wilayah
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 IKK : Indeks Kemahalan Kontruksi
 IPDRB/ kap : Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita
 α : Bobot Indeks

Sedangkan komponen variabel kapasitas fiskal yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DBH Pajak : Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Pajak
 DBH SDA : Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN disediakan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian Dana Alokasi Khusus pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan. Dasar hukum Dana Alokasi Khusus adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan juga PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam pengalokasian DAK terdapat beberapa kriteria yaitu :

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat

menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus di daerah.

Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui dua tahap yaitu dengan penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus dan penentuan besaran alokasi alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah. Arah kegiatan Dana Alokasi Khusus yaitu dalam beberapa bidang, yaitu :

1. Dana Alokasi Khusus Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukan bagi SD, baik negeri maupun swasta yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Dana Alokasi Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal melalui peningkatan jangkauan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan sarana puskesmas, dan jaringannya termasuk rumahsakit propinsi/ kabupaten/ kota.
3. Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan

edukasi, sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
5. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.
6. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7. Dana Alokasi Khusus Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. Dana Alokasi Khusus kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan serta penyediaan pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil.
9. Dana Alokasi Khusus Prasarana Pemerintah Daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran serta digunakan untuk pembangunan/ perluasan serta rehabilitasi total gedung kantor DPRD dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.
10. Dana Alokasi Khusus Lingkungan Khusus, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, serta perlindungan sumber daya air diluar kawasan hutan.
11. Dana Alokasi Khusus Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi daerah aliran sungai, meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, taman hutan raya dan kota, serta penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
12. Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan

aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasra untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok dan produksi pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di pedesaan ke daerah pemasaran.

13. Dana Alokasi Khusus Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, pesisir dan pulau kecil, serta daerah pasca bencana.

2.5.1 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi

Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah) bahkan diharapkan tiap tahunnya

akan selalu meningkat. Dan tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi.

(Mardiasmo, 2002) Seperti yang tertuang di penjelasan atas Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

2.6.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

(Mardiasmo, 2002) Dilihat sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan

air pemukiman, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak.

2.6.2 Retribusi Daerah

(Bambang Kesit, 2003) Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan tanah, ijin trayek dan lain-lain. Disamping itu ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan / mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

(Bambang Kesit, 2003) Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.6.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembagunan perekonomian daerah.

2.6.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah. Ataupun dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa dan giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan dan lain-lain.

2.7 Kerangka Berpikir

Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam Undang-undang No. 33/2004 bentuk transfer yang paling penting adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, selain bagi hasil transfer merupakan konsekuensinya dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. (Bambang Kesit, 2004) tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan

daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah.

Adanya Undang-undang No. 33 th 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjam Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dari sumber pendapatan tersebut PAD merupakan pendapatan penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) mengenai “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jateng dan DIY)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah.

(Simanjutak, 2002) Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri. (Abdul Halim 2003:1141) adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dana tersebut dapat di gunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daeran untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda dalam transfer dan pendapatan sendiri. Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka simulasi atau belanja daerah yang ditimbulkanya berbeda dengan simulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah).

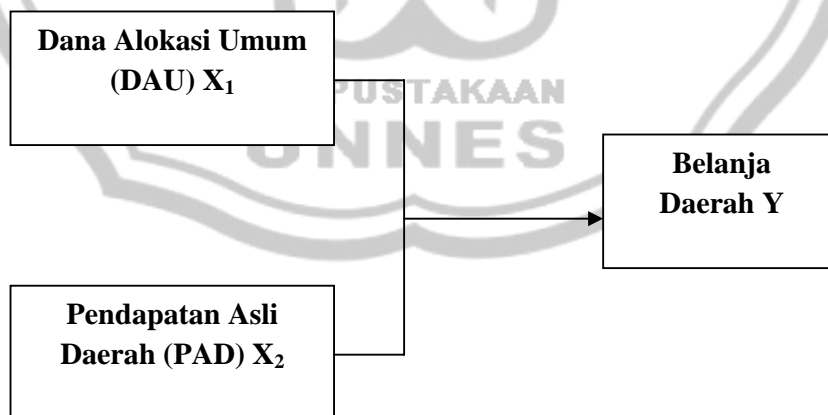
Sesuai dengan prioritas utama dari belanja daerah yaitu melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh pemerintah daerah memiliki muatan mengutamakan kepentingan pemerintah daerah (darwanto, 2007)

(kesit bambang 2004:105) menemukan bahwa transfer tahun lalu tidak dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada suetu periode tertentu tergantung kepada kesediaan sumber daya pada periode yang bersangkutan, namun dengan batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang digunakan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk

(Aziz,2000, Doi,1998) Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. (Brandford&Oales,1971a) Sementara studi tentang pengaruh transfer dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun Namun dalam studi empiris hal tersebut selalu terjadi artinya stimulasi terhadap pengeluaran daerah yang di timbulkan oleh transfer tersebut sering lebih besar di bandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri.

Holtz-Eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Disamping itu studi (Kesit Bambang 2004:105) menemukan bahwa transfer tahun lalu tidak dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan, dengan demikian kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

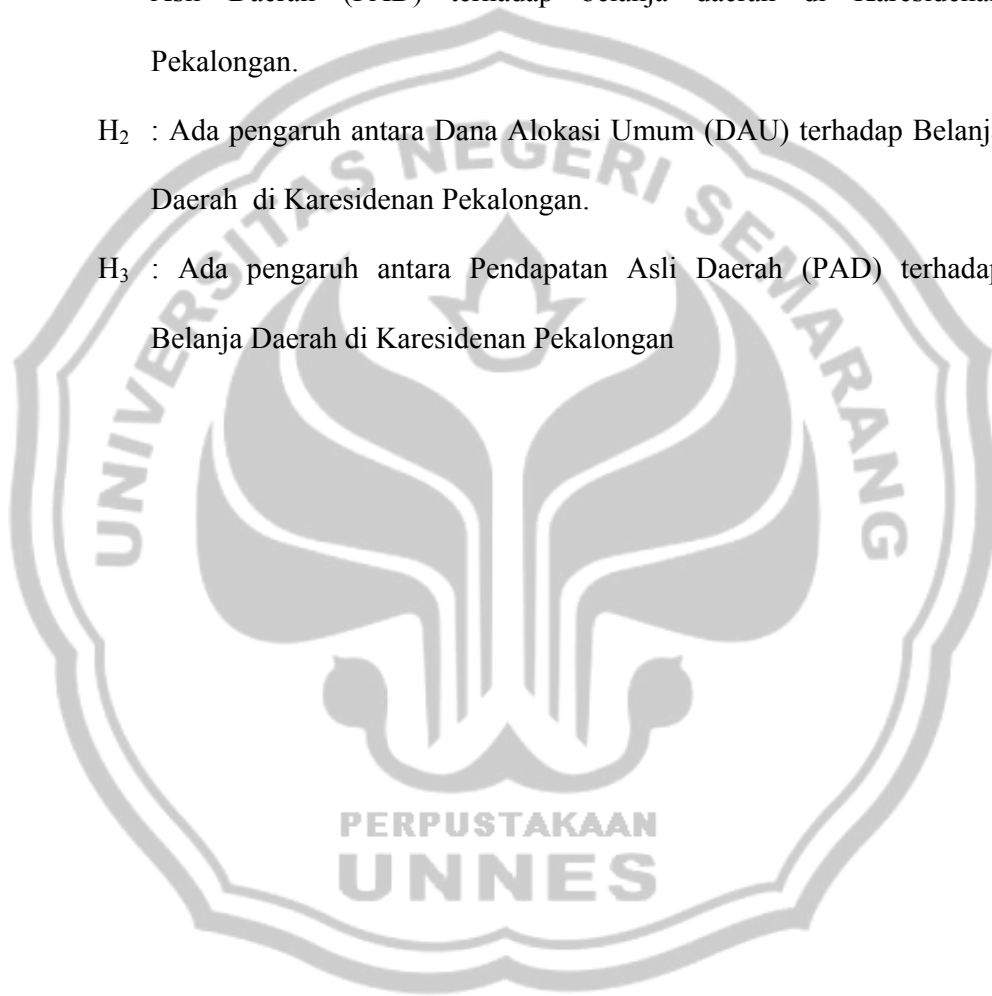
2.8 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan.

H₂ : Ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Karesidenan Pekalongan.

H₃ : Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Karesidenan Pekalongan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah se Eks Karesidenan Pekalongan meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, sedangkan sampel penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah se Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004 - 2008.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pemerintah daerah se Eks karesidenan Pekalongan yang terdiri dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah, data realisasi Dana Alokasi Umum, data realisasi Belanja Daerah yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di kota Semarang dan dari situs Dirjen perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.4 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Variabel Bebas/ Variabel Independen :

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Terdapat 2 variabel bebas dalam penelitian ini :

a. Dana Alokasi Umum (X_1)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Indikator dari Dana Alokasi Umum adalah :

1) Alokasi dasar

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi pembayaran gaji PNS masing-masing daerah perbulan, yang besarnya telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a) Kenaikan gaji rata-rata 15%
- b) Kenaikan tunjangan jabatan fungsional tertentu rata-rata 10%
- c) Kenaikan tunjangan jabatan struktural untuk eselon III, IV dan V
- d) Pemberian tunjangan fungsional umum bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan
- e) Pemberian gaji bulan ke-13
- f) Gaji untuk CPNS Formasi tahun 2005 yang telah ditetapkan oleh Menpan

2) Celah fiskal

Komponen variabel kebutuhan fiskal yang digunakan untuk pendekatan penghitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah

penduduk, luas wilayah. Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

b. Pendapatan Asli Daerah (X_2)

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Ketentuan mengenai hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Sedangkan jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang disahkan antara lain : bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah, dan pendapatan daerah yang sah antara lain : Hibah, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

2. Variabel terikat/ variabel dependen (Y)

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah belanja, dimana belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi,

metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah pada pemerintah daerah se Eks Karesidenan Pekalongan yang diperoleh dari Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Semarang dan metode Studi Pustaka, Studi Pustaka adalah metode informasi yang diperoleh dengan mencari dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan kemudian dicatat dan dipelajari untuk dijadikan data tambahan.

3.6 Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah melalui :

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel Belanja Daerah.

3.6.2 Analisis Inferensial

Analisis ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, analisis ini ditempuh dengan tahapan sebagai berikut :

3.6.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas harga dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini uji normalitas dapat diuji menggunakan Kolmogorov-Sminov terhadap masing-masing variabel. Dan juga dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada nominal *P Plot of Regression Standardized Residual* variabel independent, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Apabila data tidak berdistribusi normal, beberapa cara untuk melakukan pengujian, salah satunya adalah menggunakan tes non parametik.

3.6.2.2 Uji Asumsi klasik

1. Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dimaksud untuk menghilangkan gejala kolerasi antara variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Uji multikolonieritas juga digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kolinearitas dilakukan dengan meregresikan antar variabel bebas. Jika koefisien regresinya signifikan, maka dalam model terdapat multikolonieritas.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara *independent variable*. Jika *independent variable* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. *Orthogonal Variable* adalah *independent variable* yang nilai korelasi antar sesama *independent variable* sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi *independent variable*.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independent. Jika antar variabel independent ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variation inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$

2. Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier berganda ada kolerasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut urutan waktu (data *time series*) dan apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi berikutnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Untuk mengetahui adanya otokolerasi dalam model digunakan pengujian Durbin Watson (uji D_w) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1
TABEL Durbin Watson

D_w	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokolerasi
1,10 s/d 1,54	Tanpa kesimpulan
1.55 s/d 2.46	Tidak ada Autokorelasi
2,47 s/d 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada Autokorelasi

(Algifari, 1997:79)

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastistas adalah adanya varians variabel dalam model regresi yang tidak sama. Model regresi yang baik adalah yang berkondisi Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastistas. Konsekuensi

adanya Heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (*estimate*) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara mengetahui adanya Heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat. Adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut :

- a. Jika terdapat pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan DAU dan PAD terhadap belanja daerah dengan melihat kekuatan hubungan antar belanja daerah dengan DAU dan PAD. Model regresi linier berganda tersebut adalah :

Hubungan antara DAU dan PAD terhadap belanja daerah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- | | |
|------------|---|
| Y | = Belanja Daerah |
| a | = Konstanta |
| b_1, b_2 | = Koefisien Regresi untuk X_1 dan X_2 |
| X_1 | = Dana Alokasi Umum (DAU) |
| X_2 | = Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| μ | = Faktor lain (faktor pengganggu) |

3.6.3.1 Uji Pengaruh Simultas (F test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat dilihat jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah, sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.

3.6.3.2 Uji Pengaruh parsial (t test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. Sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah.

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi Simultan(R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi atau sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001:45). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2

mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel dependen amat terbatas. Sedangkan untuk mengetahui berapa besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan (R^2) parsialnya. Selain R^2 untuk menguji determinasi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) akan dilakukan dengan melihat pada koefisien korelasi parsial R^2 , nilai R^2 variabel bebas yang paling tinggi akan menunjukkan tingkat hubungan dan pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.

3.6.3.4 Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Apabila ingin mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan untuk masing-masing prediksi atau variabel maka diperlu dicari koefisien determinasi secara parsial, dimana untuk mencari nilainya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$r_{y12}^2 = \frac{r_{y1}^2 - r_{y12}^2 r_{y2}^2}{1 - r_{y1}^2 r_{y2}^2} \quad (Sudjana 2002:386)$$

$$r_{y21}^2 = \frac{r_{y2}^2 - r_{y12}^2 r_{y1}^2}{1 - r_{y1}^2 r_{y2}^2}$$

menghitung r^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan efektif dari masing-masing variabel bebas. Semakin besar nilai r^2 digunakan maka semakin besar sumbangannya terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis hasil penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di eks Karesidenan Pekalongan. Sebelum melakukan analisis tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan deskripsi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen yang digunakan.

4.1 Deskripsi Variabel

4.1.1 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Data gambaran dana alokasi umum eks Karesidenan Pekalongan dari tahun 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

**Gambaran Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2004 s/d 2008**

Kota / Kab.	Dana Alokasi Umum (X1)				
	2004	2005	2006	2007	2008
Brebes	375.145.860.000	402.905.000.000	609.597.000.000	657.982.000.000	716.426.000.000

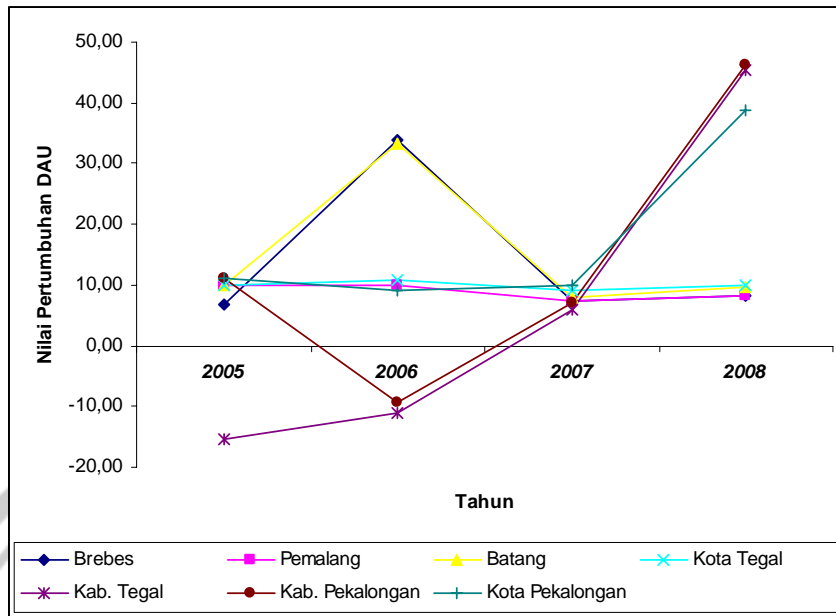
Pemalang	397.938.411.000	442.153.791.000	491.281.990.000	530.443.000.000	577.864.687.000
Batang	200.543.400.000	222.826.000.000	333.434.000.000	362.659.000.000	401.574.876.000
Kota Tegal	160.445.700.000	178.273.000.000	199.665.760.000	219.632.336.000	243.791.892.960
Kab. Tegal	397.893.242.493	344.868.890.000	310.889.230.000	330.774.664.000	606.452.130.000
Kab. Pekalongan	225.474.380.445	253.342.000.500	231.810.500.000	249.577.965.000	465.324.091.000
Kota Pekalongan	117.778.150.000	132.335.000.000	145.568.500.000	161.581.035.000	264.051.790.000

Tabel 4.2
Pergerakan Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2004 s/d 2008

Kota / Kab.	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
Brebes	6,89	33,91	7,35	8,16
Pemalang	10,00	10,00	7,38	8,21
Batang	10,00	33,17	8,06	9,69
Kota Tegal	10,00	10,71	9,09	9,91
Kab. Tegal	-15,38	-10,93	6,01	45,46
Kab. Pekalongan	11,00	-9,29	7,12	46,36
Kota Pekalongan	11,00	9,09	9,91	38,81

Sumber : Data sekunder yang diolah.

Secara grafis, tingkat pertumbuhan dana alokasi umum eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Grafik Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan
Pekalongan tahun 2004 s/d 2008

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 nilai dana alokasi umum eks Karesidenan Pekalongan mengalami fluktuatif. Dari ketujuh kota/kabupaten di eks Karesidenan Pekalongan yang memiliki kecenderungan pergerakan stabil adalah Kota Tegal dan Pemalang. Sedangkan yang mengalami kenaikan paling pesat adalah Kabupaten Tegal.

Sedangkan deskripsi statistik dana alokasi umum eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Deskripsi Dana Alokasi Umum Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Mean	267.888.449.134	282.386.240.214	331.749.568.571	358.950.000.000	467.926.495.280
Median	225.474.380.445	253.342.000.500	310.889.230.000	330.774.664.000	465.324.091.000
Standard Deviation	119.533.639.740	116.690.798.567	165.924.239.680	177.934.329.740	177.594.241.000
Minimum	117.778.150.000	132.335.000.000	145.568.500.000	161.581.035.000	243.791.892.960
Maximum	397.938.411.000	442.153.791.000	609.597.000.000	657.982.000.000	716.426.000.000

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 2)

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai deskripsi dana alokasi umum di eks karesidenan Pekalongan tahun 2004 s/d 2008 yaitu Brebes; Pemalang; Batang; Kota Tegal; Kab. Tegal; Kab. Pekalongan; serta Kota Pekalongan menunjukkan jumlah rata-rata alokasi terbanyak terjadi pada tahun 2008 sebanyak Rp. 467.926.495.280; sedangkan untuk rata-rata dana alokasi umum terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 267.888.449.134. Untuk nilai alokasi terendah, yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp. 117.778.150.000, dan nilai alokasi dana tertinggi terdapat pada tahun 2008 sebesar Rp. 716.426.000.000. Dari hasil tersebut menggambarkan dana alokasi umum dari masing-masing Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan tersebut dari tahun 2004 s/d 2008 fluktuatif/tidak stabil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian yang terjadi

di Pekalongan, sehingga jumlah dana/anggaran yang ada jumlahnya dari tahun ke tahun tidak sama.

4.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Data gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) eks Karesidenan Pekalongan dari tahun 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) eks Karesidenan
Pekalongan Tahun 2004 s/d 2008

Kota / Kab.	Pendapatan Asli Daerah (X2)				
	2004	2005	2006	2007	2008
Brebes	25.735.108.000	54.263.099.000	47.995.353.000	34.121.314.000	71.896.767.269
Pemalang	46.043.702.918	52.322.389.680	59.457.261.000	45.047.420.000	66.747.479.207
Batang	20.970.936.725	23.301.040.806	31.030.140.000	25.613.626.000	41.192.714.868
Kota Tegal	22.721.113.528	25.529.341.043	28.592.861.968	31.738.076.785	29.817.480.867
Kab. Tegal	41.917.521.604	48.015.429.308	57.026.827.108	63.363.141.231	59.370.632.183
Kab. Pekalongan	26.171.302.628	29.079.225.142	30.803.316.000	37.117.857.000	50.683.485.396
Kota Pekalongan	15.864.596.690	15.192.710.883	24.384.504.390	27.093.893.766	30.104.326.407

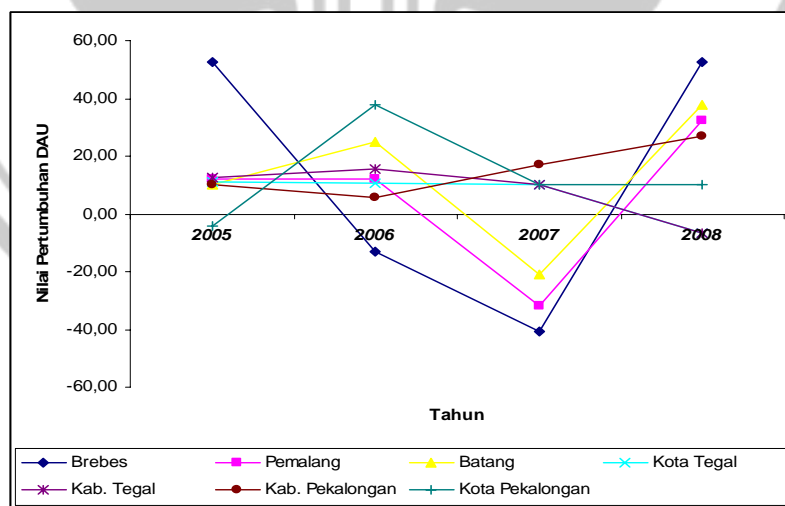
Sumber : Data sekunder yang diolah,

Tabel 4.5
Pergerakan Pendapatan Asli Daerah Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2004 s/d 2008

Kota / Kab.	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
Brebes	52,57	-13,06	-40,66	52,54
Pemalang	12,00	12,00	-31,99	32,51
Batang	10,00	24,91	-21,15	37,82
Kota Tegal	11,00	10,71	9,91	-6,44
Kab. Tegal	12,70	15,80	10,00	-6,72
Kab. Pekalongan	10,00	5,60	17,01	26,77
Kota Pekalongan	-4,42	37,70	10,00	10,00

Sumber : Data sekunder yang diolah.

Secara grafis, tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karesidenan Pekalongan tahun 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Grafik Tingkat Pertumbuhan PAD Karesidenan Pekalongan
tahun 2004 s/d 2008

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 nilai dana alokasi umum eks Karesidenan Pekalongan mengalami fluktuatif. Dari ketujuh kota/kabupaten di eks Karesidenan Pekalongan yang mengalami kenaikan paling pesat adalah Kabupaten Pekalongan.

Deskripsi pendapatan asli daerah tahun 2004 sampai 2008 di Eks Karesidenan Pekalongan, dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karesidenan
Pekalongan
Tahun 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Mean	28.489.183.156	35.386.176.552	39.898.609.067	37.727.904.112	49.973.269.457
Median	25.735.108.000	29.079.225.142	31.030.140.000	34.121.314.000	50.683.485.396
Standard Deviation	11.184.913.781	15.776.738.919	14.556.530.276	13.037.358.413	16.975.264.124
Minimum	15.864.596.690	15.192.710.883	24.384.504.390	25.613.626.000	29.817.480.867
Maximum	46.043.702.918	54.263.099.000	59.457.261.000	63.363.141.231	71.896.767.269

Sumber : Data primer yang diolah (lampiran 2)

Tabel 4.6 menunjukkan mengenai deskripsi pendapatan asli daerah di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2008 menunjukkan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2008 sebesar Rp. 49.973.269.457; sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2004 sebesar Rp. 28.489.183.156.

Kemudian nilai maksimal dari PAD terdapat pada tahun 2008 sebesar Rp. 71.896.767.269; dan nilai minimum terdapat pada tahun 2005 sebesar Rp. 15.192.710.883. Kondisi tersebut mengindikasikan kondisi yang fluktuatif pada PAD di Eks Karesidenan Pekalongan, yaitu wilayah Brebes; Pemalang; Batang; Kota Tegal; Kab. Tegal; Kab. Pekalongan; serta Kota Pekalongan. Indikasi dari nilai PAD yang fluktuatif ini karena terjadinya ketidakstabilan perekonomian di daerah eks Karesidenan Pekalongan, sehingga menjadikan nilai PAD yang tidak konstan.

4.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Gambaran belanja daerah di eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Deskripsi Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan
Tahun 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Mean	322.616.089.620	350.620.203.044	453.646.797.571	435.854.043.571	620.707.470.859
Median	278.436.133.076	309.373.481.196	473.990.148.000	415.249.624.599	672.945.318.285
Standard Deviation	178.729.548.448	191.739.913.921	261.108.446.719	334.574.731.726	292.779.303.655
Minimum	83.753.373.908	94.104.914.504	105.735.858.993	53.014.448.000	125.501.406.448
Maximum	547.804.662.930	608.671.847.700	808.841.220.000	926.371.088.000	973.243.123.522

Sumber : Data sekunder yang diolah 2010 (lampiran 2)

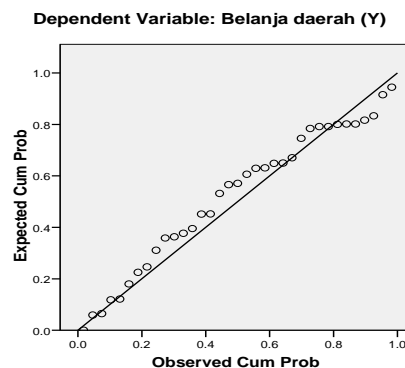
Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai deskripsi belanja daerah di eks Karesidenan Pekalongan tahun 2004-2008 menggambarkan nilai rata-rata/*mean* tertinggi terdapat pada tahun 2008 sebesar 620.707.470.859; sedangkan nilai belanja daerah terendah terdapat pada tahun 2004 sebesar Rp. 322.616.089.620. Nilai tertinggi/*maximum* dari belanja daerah terdapat pada tahun 2008 sebesar Rp. 973.243.123.522; sedangkan nilai minimum terdapat pada tahun 2007 sebesar 53.014.448.000.

4.2 Analisis Inferensial

4.2.1 Uji Normalitas

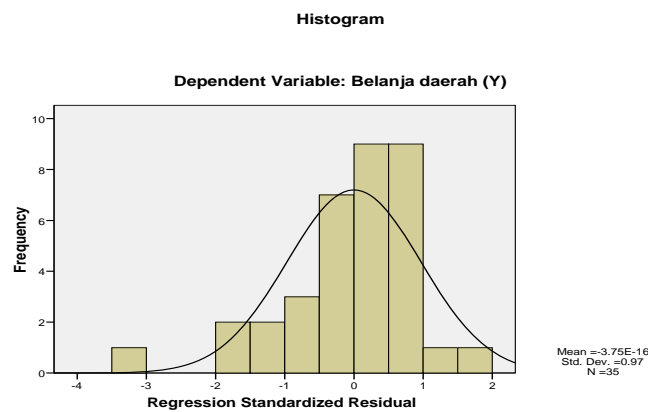
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang di kumpulkan dan diteliti termasuk data berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS ver. 15.0 (lampiran 7), yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan 4.4.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3
Diagram Normalitas dengan Diagram *P-P Plot*

Kenormalan data dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan data dari variabel dana alokasi umum (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dan belanja daerah (Y) memiliki titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data adalah berdistribusi normal.



Gambar 4.4
Diagram Normalitas dengan Grafik Distribusi Normal

Sedangkan jika dilihat dari Gambar histogram, seperti terlihat pada Gambar 4.4, terlihat bahwa garis secara simetris melengkung membentuk pola kerucut, hal ini juga menggambarkan data berdistribusi normal. Sehingga dari hasil uji normalitas, yang menyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal, maka hal ini model regresi layak dipakai sebagai prediksi berdasarkan masukan variabel independennya (Ghozali, 2005).

Selain dilakukan pengujian secara grafis, untuk memperkuat pengujian tersebut dilakukan juga analisis secara statistik, yaitu menggunakan uji

kolmogorov smirnov z, dari hasil pengujian menggunakan program SPSS (lampiran 7), dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Uji normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov z*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Dana alokasi umum (X1)	Pendapatan asli daerah (X2)	Belanja daerah (Y)
N		35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,4178E+011	38295028469	4,4E+011
	Std. Deviation	1,6169E+011	15311884129	2,7E+011
Most Extreme Differences	Absolute	,142	,180	,102
	Positive	,142	,180	,102
	Negative	-,083	-,072	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,839	1,065	,606
Asymp. Sig. (2-tailed)		,482	,207	,856

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah (lampiran 7)

Tabel 4.8 dapat memperlihatkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu variabel dana alokasi umum (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), dan belanja daerah (Y) masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel tersebut berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS ver. 15.0 (lampiran 6), diperoleh hasil perhitungan multikoleniaritas untuk variabel dana

alokasi umum (X_1), dan pendapatan asli daerah (X_2) dapat disajikan seperti pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil Perhitungan Multikolinearitas

<i>Collinearity Statistics</i>		
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
- Dana alokasi umum (X_1)	0,414	2,415
- Pendapatan asli daerah (X_2)	0,414	2,415

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 6)

Berdasarkan Tabel 4.9, menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* untuk kedua variabel independen tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 1. Jadi hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping *Durbin Watson* (DW). Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,934 (lihat lampiran 6). Dengan jumlah data (n) sama dengan 35 dan jumlah variabel (k) sama dengan 2 serta $\alpha = 5\%$ diperoleh angka $d_L = 1,28$ dan $d_U = 1,65$.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian *Durbin Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,923 ^a	,852	,843	1,050E+011	1,934

a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X2), Dana alokasi umum (X1)

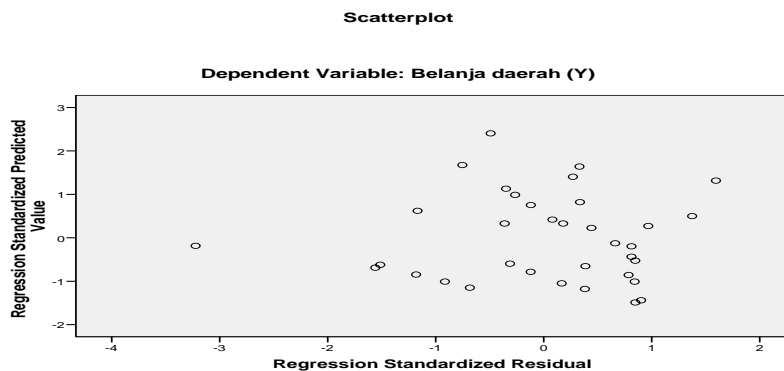
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 6)

Berdasarkan Tabel 4.10, pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji mapping *Durbin Watson* (DW). Karena nilai DW (*Durbin Watson*) = 1,934 terletak antara 4-dU dan dU maka model persamaan regresi yang diajukan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil perhitungan menggunakan SPSS ver. 15.0 (lampiran 8) dapat disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5
Diagram Heterokedastisitas

Dari diagram *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik (yang menggambarkan data) menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

4.2.3 Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) secara simultan/bersama-sama terhadap belanja daerah (Y). Hasil perhitungan uji regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program bantu SPSS ver. 15.0 (lampiran 5).

Tabel 4.11
Uji pengaruh dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja daerah (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-140862197333,89	5E+010		-2,890	,007
	Dana alokasi umum (X1)	1,090	,173	,665	6,294	,000
	Pendapatan asli daerah (X2)	5,356	1,828	,309	2,930	,006

a. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = -140.862.197.333,89 + 1,090X_1 + 5,356X_2$$

Dimana : Y = Belanja daerah

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi dari variabel X_1 dan X_2

X_1 = Dana alokasi umum

X_2 = Pendapatan asli daerah

Persamaan regresi berganda yang diperoleh, menunjukkan variabel dana alokasi umum (X_1), dan pendapatan asli daerah (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2), maka belanja daerah (Y) akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan sebesar satu satuan pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah, maka belanja daerah akan meningkat.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu uji hipotesis simultan dan uji hipotesis secara parsial.

4.2.4.1 Uji F (Uji Hipotesis Simultan)

Uji F (uji hipotesis simultan) digunakan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) secara simultan/bersama-sama terhadap belanja daerah (Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program bantu SPSS ver. 15.0 (lampiran 5). Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ho : $b_1=b_2= 0$, tidak ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

Ha : $b_1\neq b_2\neq 0$, ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

Hasil uji F dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,036E+024	2	1,018E+024	92,314	,000 ^a
	Residual	3,529E+023	32	1,103E+022		
	Total	2,389E+024	34			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X2), Dana alokasi umum (X1)

b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 5)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lampiran 5) diperoleh nilai F hitung 92,314 signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan DF1 (*degree of freedom*) = 2 dan DF2 = 32 (35-2-1) diperoleh nilai F tabel 3,29. Hasil F hitung sebesar 92,314 > F tabel 3,29 menunjukkan adanya pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 ($\alpha=5\%$). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dinyatakan hipotesis “ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

4.2.4.2 Uji t (Uji Hipotesis Parsial)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program bantu SPSS ver. 15.0 (lampiran 3 dan 4).

a. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) (X_1) terhadap belanja daerah (Y)

Rumusan Hipotesis :

$H_0 : b_2 = 0$, tidak ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

$H_a : b_2 > 0$, ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

Hasil pengujian menggunakan program SPSS ver. 15.0 dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13
Hasil uji t pengaruh dana alokasi umum (DAU)
terhadap belanja daerah (Y)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-68446121653,9	5E+010		-1,469	,151
	Dana alokasi umum (X1)	1,478	,124	,901	11,964	,000

a. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 3)

Hasil perhitungan statistik (lampiran 3) variabel dana alokasi umum (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 11,964 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan df (*degree of freedom*) sebesar 34 (35-1) diperoleh nilai t tabel sebesar 1,691. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung 11,964 > t tabel 1,691 yang mana nilai ini mengindikasikan adanya pengaruh positif dana alokasi umum (X_1) terhadap belanja daerah (Y). Sedangkan nilai signifikansi

sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) menggambarkan pengaruh yang signifikan dana alokasi umum (X_1) terhadap belanja daerah (Y). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “ ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

b. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah

Rumusan Hipotesis :

$H_0 : b_3 = 0$, tidak ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

$H_a : b_3 > 0$, ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan

Hasil pengujian menggunakan program SPSS ver. 15.0 dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Hasil Uji t Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap Belanja Daerah (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-105744194126,5	7E+010		-1,483	,148
	Pendapatan asli daerah (X2)	14,165	1,733	,818	8,174	,000

a. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 4)

Hasil perhitungan statistik (lampiran 4) variabel pendapatan asli daerah (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar 8,174 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan df (*degree of freedom*) sebesar 34 (35-1) diperoleh nilai t

tabel sebesar 1,691. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $8,174 > t$ tabel 1,691 yang mana nilai ini mengindikasikan adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja daerah (Y). Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) menggambarkan pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja daerah (Y). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

4.2.5 Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS ver. 15.0 (lampiran 5), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,852	,843	1,050E+011

a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X_2), Dana alokasi umum (X_1)

Sumber : Data sekunder yang diolah (lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 4.15, diketahui bahwa nilai *R square* (R^2) sebesar 0,852. Hal ini berarti bahwa 85,2% belanja daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel dana alokasi umum (X_1), dan pendapatan asli daerah (X_2). Sedangkan selebihnya ($100\% - 85,2\% = 14,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif dana alokasi umum (X_1) terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum, belanja daerah akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satu satuan, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini diperkuat dengan hasil hipotesis (dengan uji t) dimana dari hasil uji hipotesis mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Kesit Bambang P. (2004) dimana besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Abdul Halim (2003) mengemukakan dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, belanja daerah

akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini diperkuat dengan hasil hipotesis (dengan uji t) dimana dari hasil uji hipotesis mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Kesit Bambang P (2004) dimana pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu, menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri. Dari sumber PAD merupakan pendapatan penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil analisis menggunakan regresi dapat disimpulkan dana alokasi umum (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_2) secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi

umum dan pendapatan asli daerah, akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini juga diperkuat dari uji hipotesis, dimana nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Variabel dana alokasi umum (X_1) berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y) hasil tersebut mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum, maka belanja daerah akan semakin meningkat. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

Variabel pendapatan asli daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Y). Kondisi tersebut mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, belanja daerah akan semakin meningkat. Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan belanja daerah. Hasil ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima.

Secara simultan variabel dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Hasil tersebut mengindikasikan hipotesis yang menyatakan ”ada pengaruh antara dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Karesidenan Pekalongan” dapat diterima

5.2 Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

- a. Dana alokasi umum merupakan faktor penting dalam mempengaruhi belanja daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan besar kecilnya dana alokasi umum menentukan besar kecilnya belanja daerah. Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut pemerintah diharapkan dapat memberikan akuntabilitas terhadap penggunaan dana tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan dana tersebut, maka dana akan digunakan sebagaimana mestinya
- b. Pendapatan asli daerah di sini juga berpengaruh terhadap belanja daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah diharapkan bisa mengalokasikan dana sebagaimana mestinya, sehingga nantinya tidak terjadi devisa pada anggaran yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002, “*Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk penelitian Penyusunan Laporan Keuangan*”. Jakarta: PT. Salemba Empat
- _____. 2006, “*Sistem Akuntansi Publik*”. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Salemba Empat
- _____. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah: studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI. No. 16-17.Hal.1140-1159.
- _____. 2004. *Manajmen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2002. “*Akuntansi Sektor Publik*”, Andi Yogyakarta
- _____. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nawatmi, Sri, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah bNatuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No 2*, September, 2006.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI Vol. 8 No. 2, 2004.
- Republik Indonesia, 1999. “*UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah*”, Jakarta.
- _____. 2004. “*UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*”, Jakarta.

_____. 2004. "UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah", Jakarta.

Sudjana Nana.2002. Metode Statistika. Bandung: Transito

Suranta, Sri dan Muhammad Syafiqurrahman, "Eksistensi Pajak Daerah melalui Pajak parkir sebagai Upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah di Surakarta", *Empirika* Vol 18 No 1, Juni, 2005.

www.djpk.depkeu.go.id

www.indonesia.go.id



**TABULASI DATA DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN BELANJA DAERAH PADA EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
TAHUN 2004-2008**

TAHUN	DAERAH	DANA ALOKASI UMUM (X1)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (X2)	BELANJA DAERAH (Y)
2004	KAB. BREBES	375.145.860.000	25.735.108.000	475.275.796.000
	KAB. PEMALANG	397.938.411.000	46.043.702.918	547.804.662.930
	KAB. BATANG	200.543.400.000	20.970.936.725	278.436.133.076
	KOTA TEGAL	160.445.700.000	22.721.113.528	83.753.373.908
	KAB. TEGAL	397.893.242.493	41.917.521.604	479.235.122.172
	KAB. PEKALONGAN	225.474.380.445	26.171.302.628	232.306.225.457
	KOTA PEKALONGAN	117.778.150.000	15.864.596.690	161.501.313.797
	2005	KAB. BREBES	402.905.000.000	54.263.099.000
KAB. PEMALANG		442.153.791.000	52.322.389.680	608.671.847.700
KAB. BATANG		222.826.000.000	23.301.040.806	309.373.481.196
KOTA TEGAL		178.273.000.000	25.529.341.043	94.104.914.504
KAB. TEGAL		344.868.890.000	48.015.429.308	538.466.429.406
KAB. PEKALONGAN		253.342.000.500	29.079.225.142	258.118.028.285
KOTA PEKALONGAN		132.335.000.000	15.192.710.883	179.445.904.219
2006		KAB. BREBES	609.597.000.000	47.995.353.000
	KAB. PEMALANG	491.281.990.000	59.457.261.000	676.302.053.000
	KAB. BATANG	333.434.000.000	31.030.140.000	473.990.148.000
	KOTA TEGAL	199.665.760.000	28.592.861.968	105.735.858.993
	KAB. TEGAL	310.889.230.000	57.026.827.108	605.018.460.007
	KAB. PEKALONGAN	231.810.500.000	30.803.316.000	317.221.643.570
	KOTA PEKALONGAN	145.568.500.000	24.384.504.390	188.418.199.430
	2007	KAB. BREBES	657.982.000.000	34.121.314.000
KAB. PEMALANG		530.443.000.000	45.047.420.000	650.603.700.000
KAB. BATANG		362.659.000.000	25.613.626.000	530.144.480.000
KOTA TEGAL		219.632.336.000	31.738.076.785	104.584.505.373
KAB. TEGAL		330.774.664.000	63.363.141.231	703.315.829.627
KAB. PEKALONGAN		249.577.965.000	37.117.857.000	415.249.624.599
KOTA PEKALONGAN		161.581.035.000	27.093.893.766	197.839.109.401
2008		KAB. BREBES	716.426.000.000	71.896.767.269
	KAB. PEMALANG	577.864.687.000	66.747.479.207	767.167.955.591
	KAB. BATANG	401.574.876.000	41.192.714.868	536.192.256.633
	KOTA TEGAL	243.791.892.960	29.817.480.867	125.501.406.448
	KAB. TEGAL	606.452.130.000	59.370.632.183	872.732.362.385
	KAB. PEKALONGAN	465.324.091.000	50.683.485.396	672.945.318.285
	KOTA PEKALONGAN	264.051.790.000	30.104.326.407	397.169.873.151

LAMPIRAN 2

DESKRIPSI VARIABEL

Deskripsi Variabel Dana Alokasi Umum (X1)

		Statistics				
		Th_2004	Th_2005	Th_2006	Th_2007	Th_2008
N	Valid	7	7	7	7	7
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		267888449134,00	282386240214,29	331749568571,43	358950000000,00	467926495280,00
Median		225474380445,00	253342000500,00	310889230000,00	330774664000,00	465324091000,00
Std. Deviation		119533639739,70	116690798567,07	165924239680,31	177934329740,10	177594241000,19
Variance		1,429E+022	1,362E+022	2,753E+022	3,166E+022	3,154E+022
Minimum		117778150000,00	132335000000,00	145568500000,00	161581035000,00	243791892960,00
Maximum		397938411000,00	442153791000,00	609597000000,00	657982000000,00	716426000000,00

Deskripsi Variabel Pendapatan Asli Daerah (X2)

		Statistics				
		Th_2004	Th_2005	Th_2006	Th_2007	Th_2008
N	Valid	7	7	7	7	7
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		28489183156,14	35386176551,71	39898609066,57	37727904111,71	49973269456,71
Median		25735108000,00	29079225142,00	31030140000,00	34121314000,00	50683485396,00
Std. Deviation		11184913780,95	15776738918,76	14556530275,53	13037358412,90	16975264123,78
Variance		1,251E+020	2,489E+020	2,119E+020	1,700E+020	2,882E+020
Minimum		15864596690,00	15192710883,00	24384504390,00	25613626000,00	29817480867,00
Maximum		46043702918,00	54263099000,00	59457261000,00	63363141231,00	71896767269,00

Deskripsi Variabel Belanja Daerah (Y)

		Statistics				
		Th_2004	Th_2005	Th_2006	Th_2007	Th_2008
N	Valid	7	7	7	7	7
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		322616089620,00	350620203044,29	453646797571,43	435854043571,43	620707470859,29
Median		278436133076,00	309373481196,00	473990148000,00	415249624599,00	672945318285,00
Std. Deviation		178729548447,80	191739913920,61	261108446719,11	334574731725,72	292779303655,22
Variance		3,194E+022	3,676E+022	6,818E+022	1,119E+023	8,572E+022
Minimum		83753373908,00	94104914504,00	105735858993,00	53014448000,00	125501406448,00
Maximum		547804662930,00	608671847700,00	808841220000,00	926371088000,00	973243123522,00

LAMPIRAN 3

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_1), dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan asli daerah (X_2), Dana alokasi umum (X_1)	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 ^a	,852	,843	1,050E+011

- a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X_2),
Dana alokasi umum (X_1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,036E+024	2	1,018E+024	92,314	,000 ^a
	Residual	3,529E+023	32	1,103E+022		
	Total	2,389E+024	34			

- a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X_2), Dana alokasi umum (X_1)
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-140862197333,89	5E+010		-2,890	,007
	Dana alokasi umum (X_1)	1,090	,173	,665	6,294	,000
	Pendapatan asli daerah (X_2)	5,356	1,828	,309	2,930	,006

- a. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

LAMPIRAN 4

UJI MULTIKOLINEARITAS DAN AUTOKORELASI

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan asli daerah (X2), Dana alokasi umum (X1)	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,923 ^a	,852	,843	1,050E+011	1,934

- a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X2), Dana alokasi umum (X1)
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,0E+024	2	1,018E+024	92,314	,000 ^a
	Residual	3,5E+023	32	1,103E+022		
	Total	2,4E+024	34			

- a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah (X2), Dana alokasi umum (X1)
b. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

Coefficients^a

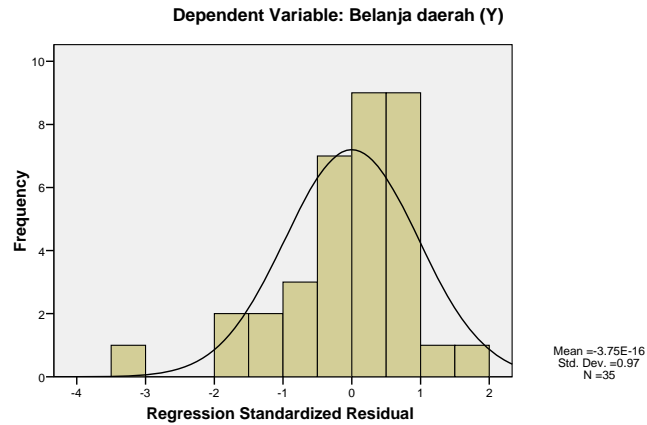
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1E+011	5E+010		-2,890	,007		
	Dana alokasi umum (X1)	1,090	,173	,665	6,294	,000	,414	2,415
	Pendapatan asli daerah (X2)	5,356	1,828	,309	2,930	,006	,414	2,415

- a. Dependent Variable: Belanja daerah (Y)

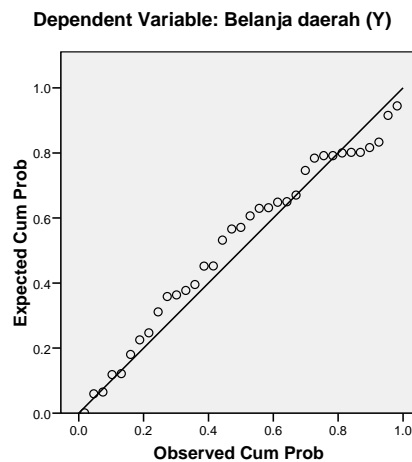
LAMPIRAN 5

UJI NORMALITAS

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Keterangan :

Dari gambar histogram diatas, terlihat bahwa garis normalitas secara simetris membentuk pola kerucut, sehingga kesimpulannya data mempunyai distribusi normal. Sedangkan jika dilihat dari grafik P-P Plot menunjukkan bahwa titik-titik (yang menggambarkan data) menyebar dan membentuk pola tertentu searah dengan garis diagonal, hal ini juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal (Ghozali, 2005).

Model Kolmogorov Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Dana alokasi umum (X1)	Pendapatan asli daerah (X2)	Belanja daerah (Y)
N		35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3,4178E+011	38295028469	4,4E+011
	Std. Deviation	1,6169E+011	15311884129	2,7E+011
Most Extreme Differences	Absolute	,142	,180	,102
	Positive	,142	,180	,102
	Negative	-,083	-,072	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,839	1,065	,606
Asymp. Sig. (2-tailed)		,482	,207	,856

a. Test distribution is Normal.

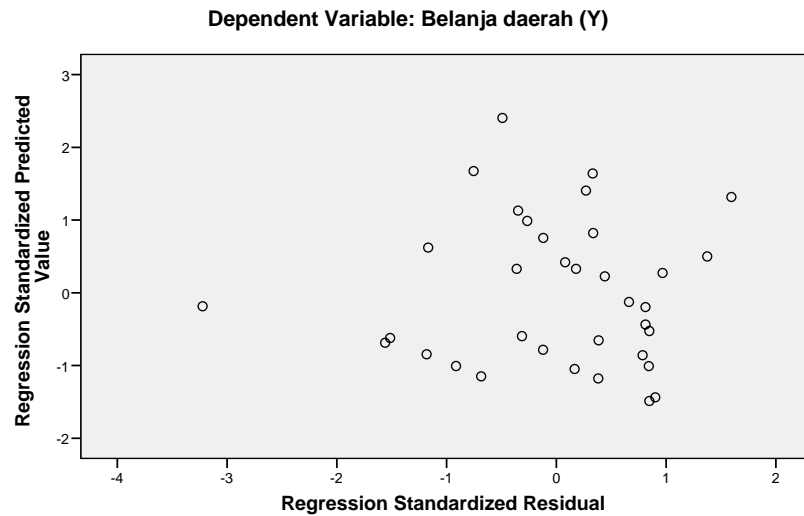
b. Calculated from data.



LAMPIRAN 6

UJI HETEROKEDASTISITAS

Scatterplot



Keterangan :

Dari diagram *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik (menggambarkan data) menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai (Ghozali, 2005).